

**IMPLEMENTASI PROGRAM *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY***  
**(Studi Pada Bina Lingkungan di Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Surya Sembada Kota Surabaya)**

**Gus Sulton Hamid**

S1 Ilmu Administrasi Negara, FIS, UNESA ([gusJr001@gmail.com](mailto:gusJr001@gmail.com))

**Dra. Meirinawati, M.AP.**

S1 Ilmu Administrasi Negara, FIS, UNESA

**Abstrak**

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Surya Sembada Kota Surabaya merupakan perusahaan yang telah menjalankan program *Corporate Social Responsibility* bina lingkungan. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi program CSR bina lingkungan. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Adapun subjek penelitian ini terdiri dari Supervisor Humas dan Protokoler PDAM Surabaya, Staff Humas PDAM Surabaya, pengguna fasilitas KASM, petugas kebersihan Taman Bungkul Surabaya, anggota Ikatan Mahasiswa Teknik Lingkungan Indonesia (IMTLI), serta siswa SMAN 16 Surabaya. Teknik pengumpulan data yang digunakan berupa dokumentasi, observasi, wawancara serta triangulasi. Analisis data yang dilakukan dengan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini bahwa PDAM Surabaya masih belum berhasil melaksanakan program CSR bina lingkungan berdasarkan model implementasi Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn. PDAM Surabaya masih belum memenuhi standar namun tujuan dan sasaran kebijakannya sudah tercapai. Sumber daya manusianya sudah cukup bagus meskipun tidak ada struktur khusus CSR. Tidak ada anggaran khusus terkait program CSR bina lingkungan PDAM Surabaya. Sumber daya waktu yang dilakukan sudah cukup baik. Koordinasi dan komunikasi dari instansi-instansi yang terlibat sudah terjalin dengan baik. Instansi yang terlibat dalam pelaksanaan program CSR bina lingkungan PDAM Surya Sembada Kota Surabaya adalah Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan (BBTKL) dan Dinas Kesehatan dan Pertamanan (DKP) Kota Surabaya yang mempunyai karakteristik masing-masing. Para agen pelaksana tersebut sudah mempunyai wewenang, tugas, dan fungsinya masing-masing. Kondisi sosial yang terjadi pada pelaksanaan program CSR adalah perilaku dari masyarakat itu sendiri. Selain itu kondisi tempat juga menentukan keberhasilan program CSR yang akan dilaksanakan. Kondisi politik yang mempengaruhi pelaksanaan program CSR ini ialah dukungan dari Pemerintah Surabaya. Kondisi ekonomi yang ada pada pelaksanaan program CSR bina lingkungan adalah dibutuhkannya anggaran tambahan yang biasanya berasal dari instansi lain yang menjadi partner PDAM dalam menjalankan program CSR, misalnya saja DKP. Respon dari petugas pelaksana sangat positif. Saran dari peneliti yaitu PDAM Surabaya sebaiknya mengadakan staff khusus guna menangani program CSR. Selain itu PDAM juga harus menyiapkan dana khusus dalam pelaksanaan program CSR.

Kata kunci : Implementasi, Bina Lingkungan

**Abstract**

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Surya Sembada Kota Surabaya is a company that has been running a program of corporate social responsibility and community. This study aims to describe the implementation of CSR community development. Research methodology that is used is descriptive qualitative. As for the subject of this research consist of Supervisor Humas and Protokoler PDAM Surabaya, Staff Humas PDAM Surabaya, users facilities KASM, janitor park Bungkul Surabaya, member of Ikatan Mahasiswa Teknik Lingkungan Indonesia (IMTLI), and students SMAN 16 Surabaya. Engineering data used of documentation, observation, interviews and triangulation. Data analysis was done with the collection of data, data presentation, data reduction, conclusion and withdrawal. The result of this research PDAM Surabaya still haven't managed to implement CSR community development programs based on the model of implementation Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn. PDAM Surabaya still not meet the standards but purpose and target group have been achieved. Human resources was pretty good though no special structure CSR. There is no special budget related CSR community programs PDAM Surabaya. The resources time is good enough. Coordination and communication of agencies involved have been running well. Agencies involved in the implementation of CSR community programs PDAM Surya Sembada Kota Surabaya is Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan (BBTKL) and Dinas Kesehatan and Pertamanan (DKP) Kota Surabaya having the characteristics of each. Managing the agents already had the authority, duties, and functions of each. The social conditions that occur on the implementation of the CSR program is the behavior of the community itself. Besides condition place also the success csr to be implemented. Political conditions that affect the implementation of the CSR program is the support from the Government of Surabaya. Economic condition that were on the csr community development is needed additional budget usually derived from other agencies that partners PDAM in running CSR, for example DKP. Executive Officer of

response is very positive. The advice of researchers which TAPS staff should hold special Surabaya to handle the CSR programs. Besides PDAM special funds have to prepare well in the implementation of CSR programs.  
Keywords : implementation, community development

## PENDAHULUAN

Dewasa ini, pemberdayaan lingkungan dan masyarakat merupakan hal yang penting yang harus dilaksanakan, bukan hanya oleh masyarakat dan juga pemerintah, melainkan juga dunia usaha. Seperti halnya yang diungkapkan oleh Suharto (2010:4) bahwa operasi bisnis yang berkomitmen tidak hanya untuk meningkatkan keuntungan perusahaan secara finansial saja, melainkan pula untuk pembangunan sosial-ekonomi kawasan secara holistik, melembaga, dan berkelanjutan.

Sehubungan dengan hal tersebut, pemerintah mengeluarkan peraturan bagi Perseroan Terbatas (PT) yang mengelola Sumber Daya Alam (SDA) diwajibkan melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Bagi penanaman modal asing, diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, dalam Pasal 15 (b) dinyatakan bahwa "Setiap penanam modal berkewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan". Dalam Peraturan Pemerintah No 47 Tahun 2012 tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan Perseroan Terbatas pasal 3 ayat 1 juga menegaskan bahwa tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi kewajiban bagi Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam berdasarkan Undang-Undang.

Program yang terkait tanggung jawab sosial dan lingkungan yang dimiliki dan wajib dilaksanakan oleh setiap Persero dan atau juga Badan Usaha Milik Negara (BUMN) disebut dengan program *Corporate Social Responsibility* (CSR). CSR adalah suatu tindakan atau konsep yang dilakukan oleh perusahaan (sesuai kemampuan perusahaan tersebut) sebagai bentuk tanggung jawab mereka terhadap sosial/lingkungan sekitar dimana perusahaan itu berada. CSR diterapkan kepada perusahaan-perusahaan yang beroperasi dalam konteks ekonomi global, nasional, maupun lokal.

Dalam melaksanakan program CSR, suatu perusahaan biasanya menggunakan konsep 3P. Konsep 3P (*profit, people, and planet*) yang sangat mashyur dikalangan perusahaan, adalah sebuah gambaran bahwasanya perusahaan selalu mempunyai dampak langsung terhadap lingkungan (*planet*). Dengan demikian, program-program CSR juga tidak bisa meninggalkan implementasinya khususnya dalam bidang lingkungan. Apalagi hal ini dikaitkan dengan perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang lingkungan dan eksploitasi hasil bumi (Suharto, 2010:150).

Pelaksanaan program CSR diatur secara rinci oleh Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-05/MBU/27 April 2007 tentang program kemitraan BUMN dengan usaha kecil dan program bina lingkungan. Seperti yang kita ketahui, CSR milik BUMN adalah berupa program kemitraan dan bina lingkungan. Sebagaimana yang disebutkan dalam peraturan-peraturan diatas mengenai kewajiban suatu perusahaan untuk melaksanakan tanggung jawab sosial yang berupa Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL). Dalam pelaksanaannya, bentuk-bentuk kegiatan dalam PKBL harus mengacu pada Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-05/MBU/27 April 2007 tentang program kemitraan BUMN dengan usaha kecil dan program bina lingkungan. Sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 2 bahwa Perum dan Persero wajib melaksanakan Program Kemitraan dan Program BL dengan memenuhi ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Peraturan ini. Dalam Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-05/MBU/27 april 2007 pasal 9 juga menjelaskan bahwa sumber dana PKBL berasal dari penyisihan laba bersih perusahaan sebesar 2% yang dapat digunakan untuk Program Kemitraan ataupun Bina Lingkungan.

Salah satu perusahaan atau persero yang melaksanakan program CSR yang berupa PKBL adalah Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Surya Sembada Surabaya. Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Surya Sembada Surabaya merupakan salah satu perusahaan daerah yang bergerak dibidang air minum yang juga mempunyai kepedulian terhadap tanggung jawab sosial dan lingkungan sekitarnya. Kepedulian terhadap tanggung jawab sosial dan lingkungan tersebut, diwujudkan dalam bentuk program CSR Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Surya Sembada Surabaya yang berupa program kemitraan dan bina lingkungan. Salah satu bidang yang akan menjadi fokus penelitian disini adalah bina lingkungan. Pengambilan Program CSR bina lingkungan sebagai fokus penelitian, dilatar belakangi karena lingkungan merupakan bagian yang penting bagi tingkat kemajuan suatu perusahaan, dan setiap perusahaan harus mempunyai kepedulian yang lebih terhadap lingkungan, seperti halnya yang diungkapkan oleh Elkington dalam (Suharto,2010:5) bahwa perusahaan yang baik tidak memburu keuntungan ekonomi belaka (*profit*). Melainkan pula, memiliki kepedulian terhadap kelestarian lingkungan (*planet*) dan kesejahteraan masyarakat (*people*).

Salah satu bentuk program CSR bina lingkungan yang dilakukan oleh Perusahaan Daerah Air Minum

(PDAM) Surya Sembada Surabaya yaitu dengan membangun KASM (Kran Air Siap Minum). KASM (Kran Air Siap Minum) tersebut telah dibangun di beberapa fasilitas publik di Kota Surabaya seperti halnya di Taman Bungkul, Taman Mundu, Terminal Bratang, dan lain-lain (Diakses pada 13 Mei 2014 pukul 13:25, <http://mediacsr.net>).

Permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan program CSR bina lingkungan yang dilakukan oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Surya Sembada Surabaya, terletak pada segi anggaran. PDAM Surya Sembada Kota Surabaya tidak menyiapkan dana khusus guna pelaksanaan program CSR. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Rahmat selaku staff Humas PDAM Surya Sembada Kota Surabaya bahwa untuk pelaksanaan program CSR disini masih belum ada dana khusus mas, jadi selama ini pelaksanaan program CSR anggarannya masih ikut Humas (wawancara, tanggal 20 juni 2014)

Selain itu permasalahan juga terjadi di lapangan, yaitu sering rusaknya fasilitas KASM yang juga bagian dari program CSR bina lingkungan PDAM Surya Sembada Kota Surabaya. Seperti yang diungkapkan oleh Donna Monika selaku pengunjung Taman Bungkul yang juga pengguna fasilitas KASM bahwa KASM disini sebenarnya sering bermasalah mas, kadang airnya tidak keluar, kadang juga krannya rusak (wawancara, tanggal 22 juni 2014)

Masalah-masalah yang telah dijelaskan diatas ialah alasan peneliti melakukan penelitian pada program *corporate social responsibility* (studi pada Bina Lingkungan di Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Surya Sembada Surabaya). Melihat pada masalah implementasi kebijakan yang ada, serta kasus program CSR yang mengarah pada variabel yang disebutkan oleh Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn yang meliputi standar, sumber daya, dan juga kondisi sosial, maka akan sangat sesuai apabila teori yang digunakan dalam mendeskripsikan pelaksanaan program *corporate social responsibility* (studi pada bina lingkungan di Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Surya Sembada Surabaya) mengambil teori implementasi yang diungkapkan oleh Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn (Soebarsono 2008:99).

Fakta-fakta tersebut mengundang peneliti untuk melakukan penelitian yang berjudul “Implementasi Program *Corporate Social Responsibility* (Studi Pada Bina Lingkungan di Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Surya Sembada Surabaya)”.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “bagaimana Implementasi Program *Corporate Social Responsibility* (Studi Pada Bina Lingkungan di

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Surya Sembada Surabaya)”. Sesuai dengan latar belakang dan rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini adalah menggambarkan secara konkrit Implementasi Program *Corporate Social Responsibility* (Studi Pada Bina Lingkungan di Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Surya Sembada Surabaya)”.

## 1. Kebijakan Publik

Kebijakan publik oleh Dye (Widodo, 2006:12) diartikan apapun pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu (*public policy is whatever governments choose to do or not to do*). Kebijakan publik adalah serangkaian tujuan dan sasaran dari program-program pemerintahan.

Pada dasarnya sebuah kebijakan publik terbentuk ketika dalam kehidupan masyarakat terdapat permasalahan yang kompleks sehingga menuntut adanya sebuah tindakan sebagai sesuatu yang dapat memecahkan masalah yang sedang dihadapi. Hal ini sesuai dengan pernyataan yang dikemukakan oleh Udoji (Wahab, 1997:5) bahwa “Kebijakan publik adalah sebagai *an sanctioned course of action addressed to a particular problem or group of related problem that affect society at large* (suatu tindakan bersanksi yang mengarah pada suatu tujuan yang diarahkan pada suatu masalah tertentu yang saling berkaitan yang mempengaruhi besar warga masyarakat)”.

Keputusan yang dibuat oleh pemerintah sangat penting mengandung tujuan yang jelas dan konsisten dalam rangka memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat dalam artian bahwa kegiatan sebagai bentuk kebijakan dari pejabat pemerintah harus memiliki pengaruh positif terhadap kehidupan masyarakat. Proses kebijakan publik melibatkan aktor-aktor kebijakan sebagai pihak yang mengambil keputusan. Pengertian kebijakan publik adalah serangkaian kegiatan yang mempunyai maksud atau tujuan yang diikuti dan dilaksanakan oleh seseorang aktor atau sekelompok aktor yang berhubungan dengan suatu permasalahan atau suatu hal yang diperhatikan.

## 2. Pengertian Implementasi Kebijakan

Konsep implementasi berasal dari bahasa inggris yaitu *to implement*. Menurut Webster dalam Wahab, *to implement* (mengimplementasikan) berarti *to provide the means for carrying out* (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu); dan *to give practical effect to* (untuk menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu (2005:64). Selain itu, Van Meter dan Van Horn dalam Wahab menjelaskan bahwa Implementasi adalah “*those actions by public or private individuals (or groups) that are directed at the achievement of objectives set forth in prior policy decisions*” atau diterjemahkan tindakan-

tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan (2005:65).

Definisi lain juga diutarakan oleh Winarno, implementasi kebijakan adalah bagian dari rangkaian proses kebijakan publik. Masih menurut Winarno, proses kebijakan adalah suatu rangkaian tahap yang saling bergantung yang diatur menurut urutan waktu: penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, dan penilaian kebijakan (2002:29).

Berdasarkan beberapa definisi yang disampaikan para ahli di atas, dapat diartikan bahwa implementasi merupakan suatu kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh pelaksana kebijakan setelah perumusan/pembuatan kebijakan dengan harapan akan memperoleh suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran dari suatu kebijakan itu sendiri. Implementasi mengacu pada tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan, tindakan ini berusaha untuk mengubah keputusan-keputusan tersebut menjadi pola-pola operasional serta berusaha mencapai perubahan-perubahan besar atau kecil sebagaimana yang telah diputuskan sebelumnya yang akan menentukan berhasil atau tidaknya implementasi dari kebijakan itu sendiri.

### 3. Unsur – unsur Implementasi Kebijakan

Pemahaman mengenai unsur-unsur Implementasi menjadi penting mengingat Implementasi merupakan suatu tahap pelaksanaan dari sebuah kebijakan publik yang telah ditetapkan. Oleh karena itu peneliti berusaha memaparkan Unsur-unsur Implementasi untuk mengetahui apa dan siapa saja yang berada pada Proses Implementasi sebuah kebijakan. Unsur-unsur dari implementasi kebijakan yang terdapat dalam Tachjan (2006:56) yang mutlak harus ada yaitu Unsur pelaksana, Program yang akan dilaksanakan serta *Target groups* atau kelompok sasaran.

### 4. Model Implementasi

Keberhasilan implementasi menurut Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn dalam Soebarsono (2008:99) dipengaruhi oleh enam variabel, yakni standar, tujuan dan sasaran kebijakan, sumber daya, komunikasi antar organisasi, karakteristik agen pelaksana, kondisi sosial, politik, ekonomi, dan disposisi implementor.

### METODE

Pada penelitian tentang “Implementasi Program *Corporate Social Responsibility* (Studi Pada Bina Lingkungan di Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM)

Surya Sembada Kota Surabaya)” merupakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif.

Pelaksanaannya dilakukan di Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Surya Sembada Kota Surabaya yang bertempat di Jalan Mayjen Dr. Moestopo No. 2 Surabaya dikarenakan permasalahan yang disebutkan diatas terjadi pada program CSR bina lingkungan yang dilaksanakan oleh PT. Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Surya Sembada Surabaya, sehingga peneliti tertarik menjelaskan secara lebih lengkap mengenai pelaksanaan program CSR bina lingkungan yang dilaksanakan oleh PT. Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Surya Sembada Surabaya.

Untuk mendapatkan informasi dari subjek penelitian, maka teknik yang digunakan adalah *Purposive sampling dan snowball sampling*. Dalam penelitian ini, yang menjadi narasumber untuk penelitian Implementasi CSR bina lingkungan PDAM Surabaya yaitu:

1. Supervisor Humas dan Protokoler PDAM Surabaya yaitu Bapak Erwin Prasetyo
2. Staff Humas PDAM Surabaya yaitu Bapak Rahmat
3. Pengunjung sekaligus pengguna fasilitas Taman Bungkul yaitu Zainal Arifin dan Donna Monika
4. Petugas kebersihan Taman Bungkul yaitu Bapak Supri
5. Satria Dwi Bagaskara selaku mahasiswa yang termasuk dalam Ikatan Mahasiswa Teknik Lingkungan Indonesia (IMTLI) dan juga Reksa Apriansyah selaku siswa SMAN 16 Surabaya.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian menggunakan teknik 4 teknik, yaitu:

1. Observasi Terus Terang atau Tersamar  
Teknik observasi terus terang adalah teknik pengumpulan data dengan menyatakan terus terang kepada sumber data, bahwa ia sedang melakukan penelitian sehingga sumber-sumber yang diteliti mengetahui sejak awal sampai akhir tentang aktivitas peneliti.

2. Wawancara Wawancara Mendalam Secara Tak Berstruktur

Dalam penelitian ini, wawancara yang digunakan peneliti adalah wawancara mendalam secara tak berstruktur, yang artinya peneliti mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara lebih bebas dan leluasa, tanpa terikat oleh suatu susunan pertanyaan yang telah dipersiapkan sebelumnya, dengan teknik ini peneliti berharap wawancara berlangsung secara fleksibel, lebih terbuka, percakapan tidak membuat jenuh sehingga informasi yang diperoleh lebih banyak.

3. Dokumentasi

Dalam penelitian ini, peneliti juga menggunakan teknik dokumentasi meliputi buku catatan untuk mencatat semua percakapan dan *handphone* yang

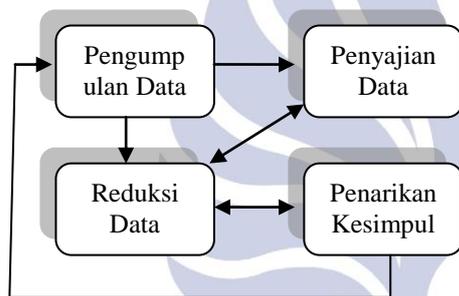
digunakan untuk merekam semua percakapan atau pembicaraan serta *camera digital* untuk memotret momen pada saat melakukan wawancara dengan informan agar data yang diperoleh lebih *valid, reliable, dan akuntable*.

#### 4. Triangulasi

Triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Triangulasi sumber digunakan untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data yang diperoleh melalui sumber. Sedangkan triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas data dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama, dengan teknik yang berbeda, yaitu melalui observasi, wawancara dan dokumentasi.

Dalam menganalisis data, peneliti menggunakan model analisis versi Miles dan Huberman. Langkah-langkah analisis data dapat dilihat sebagai berikut.

Gambar 1 Komponen Dalam Analisis Data



Sumber: Miles & Huberman (Patilima,2004:100)

Sumber: Sugiyono (2013:208)

#### 1. Reduksi Data (*data reduction*)

Mereduksi data berarti merangkum dan memilih hal-hal yang pokok dari data yang telah didapat pada saat observasi, wawancara, dan dokumentasi. Pada saat mereduksi data, setiap peneliti akan dipandu oleh tujuan yang akan dicapai, dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya apabila diperlukan.

#### 2. Penyajian Data (*data display*)

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, tabel, grafik, dan sejenisnya. Melalui penyajian data tersebut maka data terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan sehingga akan mudah dipahami.

#### 3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi (*Conclusion drawing/verification*)

Langkah yang terakhir dalam analisis data kualitatif menurut Miles and Huberman adalah penarikan kesimpulan dan melakukan verifikasi. Baik dari segi makna maupun kebenaran kesimpulan yang disepakati oleh subjek tempat penelitian dilaksanakan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hasil Penelitian

#### A. Deskripsi Lokasi

PDAM atau Perusahaan Daerah Air Minum merupakan salah satu unit usaha milik daerah, yang bergerak dalam distribusi air bersih bagi masyarakat umum. PDAM terdapat di setiap provinsi, kabupaten, dan kotamadya di seluruh Indonesia. PDAM merupakan perusahaan daerah sebagai sarana penyedia air bersih yang diawasi dan dimonitor oleh aparat-aparat eksekutif maupun legislatif daerah.

Perusahaan air minum yang dikelola negara secara modern sudah ada sejak zaman penjajahan Belanda pada tahun 1920-an dengan nama *Waterleiding* sedangkan pada pendudukan Jepang perusahaan air minum dinamai *Suido Syo*.

Berdirinya PDAM Kota Surabaya merupakan peninggalan jaman Belanda, dimana pembentukan sebagai BUMD berdasarkan :

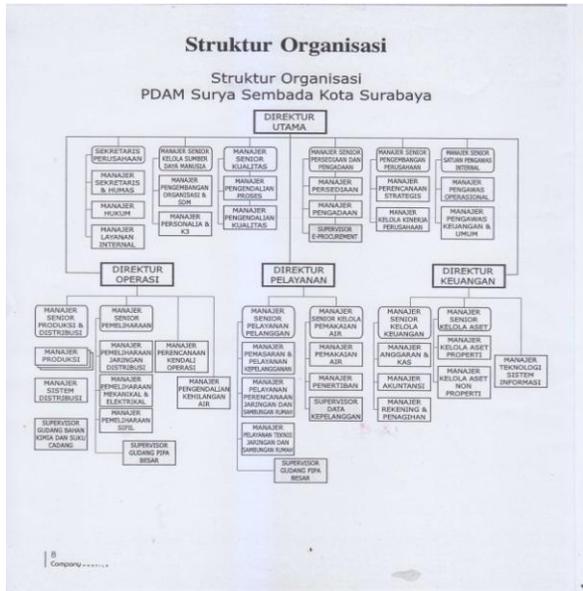
1. Peraturan Daerah No. 7 tahun 1976 tanggal 30 Maret 1976
2. Disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur, tanggal 06 Nopember 1976 No. II/155/76
3. Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tahun 1976 seri C pada tanggal 23 Nopember 1976 No. 4/C.

PDAM Surabaya memiliki Visi yaitu "Tersedianya air minum yang cukup bagi pelanggan melalui Perusahaan Air Minum yang mandiri, berwawasan global dan terbaik di Indonesia" dan misi yaitu "Memproduksi dan mendistribusikan air minum bagi pelanggan, memberi pelayanan prima bagi pelanggan dan berkelanjutan bagi pemangku kepentingan, melakukan usaha lain bagi kemajuan perusahaan dan berpartisipasi aktif dalam kegiatan sosial kemasyarakatan".

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Surya Sembada Kota Surabaya dalam pengelolaan organisasinya memiliki 1 (satu) orang Direktur Utama yang membawahi 1 (satu) orang Sekretaris Perusahaan, 1 (satu) orang Supervisor, dan 18 (delapan belas) orang Manajer. 1 (satu) orang Direktur Operasi yang membawahi 2 (dua) orang Supervisor dan 9 (sembilan) orang Manajer. 1 (satu) orang Direktur Pelayanan yang membawahi 2 (dua) orang Supervisor dan 7 (tujuh) orang Manajer. 1 (satu) orang Direktur Keuangan yang membawahi 8 (delapan) orang Manajer. Berikut adalah bagan dari struktur organisasi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Surya Sembada Kota Surabaya :

Surabaya yang baru dilaksanakan tahun ini. Pelaksanaan program tersebut dilaksanakan bertepatan dengan Hari Bumi 2014 (*Earth Day*) pada tanggal 22 April 2014 lalu. Hari Bumi atau dikenal sebagai Earth Day adalah salah satu gerakan global yang mendunia. Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan kesadaran dan apresiasi terhadap bumi. Mengajak masyarakat peduli terhadap lingkungan hidup.

Gambar 2  
Struktur organisasi PDAM Surya Sembada Kota Surabaya



Sumber: Dokumen PT. Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Surya Sembada Kota Surabaya (2014)

**B. Bentuk program CSR Bina Lingkungan yang dilakukan oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Surya Sembada Kota Surabaya**

1. Susur sungai

Susur sungai merupakan salah satu bagian dari program CSR bina lingkungan yang dilaksanakan oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). Program susur sungai ini dilaksanakan dalam rangka memperingati Hari Air Dunia (*World Water Day*) yang jatuh pada tanggal 22 Maret. Hari Air Dunia adalah perayaan setiap tahun yang dicanangkan Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai usaha untuk menarik perhatian publik akan pentingnya air bersih dan usaha penyadaran untuk pengelolaan sumber-sumber air bersih yang berkelanjutan. Program susur sungai tersebut dilaksanakan oleh PDAM sejak tahun 2013 dan rencananya akan dilakukan secara berkelanjutan setiap tahunnya pada Hari Air Dunia.

2. Pemberian gerobak sampah

Program pemberian gerobak sampah ini merupakan salah satu bagian dari program CSR bina lingkungan PDAM Surya Sembada Kota

3. Roadshow Sekolah

Tidak hanya untuk kalangan mahasiswa, kegiatan CSR PDAM Surya Sembada Kota Surabaya juga menyasar siswa sekolah dari tingkat SD sampai dengan SMU dalam bentuk *Roadshow Sekolah*. *Roadshow* sekolah diselenggarakan di SMU Negeri 16 Surabaya, SMP Negeri 29 Surabaya dan SDN Tegalsari I/321 Surabaya. *Roadshow* sekolah tersebut dilaksanakan pada tanggal 2 April 2013 di SDN Tegalsari I/321 Surabaya, 10 April 2013 di SMU Negeri 16 Surabaya, dan 16 April 2013 di SMP Negeri 29 Surabaya.

4. Kran Air Siap Minum (KASM)

Untuk memberikan kemudahan pada warga dalam mendapat layanan air bersih dan siap minum, PDAM Surya Sembada Surabaya melalui program CSR bina lingkungannya membangun Kran Air Siap Minum (KASM) di beberapa tempat yang menjadi fasilitas publik di Surabaya. Pemasangan KASM ini bertujuan juga untuk menyediakan layanan air minum gratis yang dapat diminum langsung sekaligus meningkatkan kepedulian masyarakat pada lingkungan hidup, dengan mengurangi penggunaan plastik untuk kemasan air minum.

**C. Implementasi Program CSR Bina Lingkungan PDAM Surya Sembada Kota Surabaya**

Implementasi kebijakan adalah bagian dari rangkaian proses kebijakan publik. Proses kebijakan adalah suatu rangkaian tahap yang saling bergantung yang diatur menurut urutan waktu: penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, dan penilaian kebijakan (Winarno, 2002:29). Perlu ditekankan bahwa tahap implementasi kebijakan tidak akan dimulai sebelum tujuan dan saran-saran ditetapkan atau diidentifikasi oleh keputusan-keputusan kebijakan. Dengan demikian, tahap implementasi terjadi hanya setelah undang-undang ditetapkan dan dana disediakan untuk membiayai implementasi kebijakan tersebut (Winarno, 2002:102).

Implementasi program CSR bina lingkungan PDAM Surya Sembada Kota Surabaya ini didiskripsikan dan dianalisis menggunakan model implementasi Van Metter Van Horn dengan enam variabel yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan yaitu ukuran dan tujuan kebijakan, sumber daya, karakteristik agen pelaksana, sikap atau kecenderungan

(Disposition) para pelaksana, komunikasi antar organisasi dan agen pelaksana, dan lingkungan sosial, ekonomi dan politik.

Berikut analisis Implementasi program CSR bina lingkungan PDAM Surabaya berdasarkan enam variabel yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan model implementasi Van Metter Van Horn.

#### 1. Standar, tujuan dan sasaran kebijakan

Pelaksanaan program CSR bina lingkungan sudah diatur dengan jelas dalam Peraturan Menteri BUMN No. PER-05/MBU/27 april 2007 tentang program kemitraan BUMN dengan usaha kecil dan program bina lingkungan. Dalam Permen itu sendiri juga sudah dijelaskan mengenai standar yang ada pada pelaksanaan program CSR bina lingkungan. Faktanya, dalam pelaksanaan program CSR bina lingkungan PDAM Surya Sembada Kota Surabaya masih belum memenuhi standar. Hal ini dibuktikan dengan penemuan di lapangan oleh peneliti bahwa tidak ada dana khusus yang memang disiapkan untuk pelaksanaan program CSR tersebut. Merujuk pada Peraturan Menteri BUMN No. PER-05/MBU/27 bahwa standar pelaksanaan program CSR bina lingkungan, dana program bina lingkungan bersumber dari penyisihan laba setelah pajak maksimal sebesar 2%. Selama ini dana yang dipakai ialah dana yang dimiliki oleh bagian Humas PDAM Surya Sembada Kota Surabaya yang jumlahnya 1milyar per tahunnya.

Dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan program CSR bina lingkungan PDAM Surya Sembada Kota Surabaya masih belum memenuhi standar, karena masih mempunyai masalah terkait dana yang dipakai dalam pelaksanaannya. Sementara itu tujuan dari program CSR bina lingkungan PDAM Surya Sembada Kota Surabaya adalah guna menjalankan tanggung jawab sosial perusahaan. Tujuan pelaksanaan program CSR tersebut memang sudah tercapai hanya sanya saja dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatannya masih ada beberapa harapan yang belum tercapai, misalnya saja harapan mengurangi sampah dengan membangun fasilitas KASM. Adanya standar dan tujuan kebijakan ada juga sasaran yang harus dituju dalam pelaksanaan program CSR. Menurut Donald S.Van Meter dan Carl E. Van Horn keberhasilan dalam implementasi juga tepatnya sasaran yang dituju. Dalam hal ini sasaran dari pelaksanaan program CSR bina lingkungan ini adalah seluruh elemen masyarakat. Elemen masyarakat tersebut adalah masyarakat dari anak kecil sampai dengan

orang tua dan juga sektor pendidikan. Sehubungan dengan ini program CSR bina lingkungan PDAM Surya Sembada Kota Surabaya sendiri sudah tepat sasaran. Hal ini juga dibuktikan dengan hasil peneliti ketika dilapangan bahwa memang dalam praktik pelaksanaan program CSR bina lingkungan sudah dapat mencakup seluruh elemen masyarakat yang ada, dari anak kecil sampai dengan orang tua, sektor pendidikan dan juga antusias masyarakat terhadap program ini sangat tinggi karena elemen masyarakat berkumpul di satu titik dan memanfaatkan fasilitas publik yang terdapat di Surabaya.

#### 2. Sumber daya

##### a. Sumber daya mausia

Sehubungan dengan ini, sumber daya manusia pada pelaksanaan program CSR bina lingkungan khususnya para pelaksana terdiri dari petugas PDAM Surya Sembada Kota Surabaya, Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan (BBTKL) dan juga Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kota Surabaya. Para petugas pelaksana sudah ditempatkan dan difungsikan dalam tugasnya masing-masing. Dalam pemilihan petugas pelaksana, PDAM Surya Sembada Kota Surabaya memilih para petugas yang kompeten dan terampil, sehingga petugas mampu mempunyai kecepatan, ketepatan dan ketanggapan dalam praktik pelaksanaan program CSR bina lingkungan. Dalam praktik pelaksanaannya petugas sudah diberikan fasilitas-fasilitas yang mereka perlukan. Fasilitas tersebut misalnya saja berupa kapal, peralatan ledeng, dan lain sebagainya.

Dapat disimpulkan bahwa dalam praktik pelaksanaannya, program CSR bina lingkungan sudah didukung dengan sumber daya yang terampil dan kompeten dalam bidangnya.

##### b. Sumber daya finansial

Terkait sumber daya finansial yang terdapat dalam pelaksanaan program CSR bina lingkungan PDAM Surya Sembada Kota Surabaya, disini terjadi ketidaksesuaian antara peraturan yang sudah ditetapkan di Peraturan Menteri BUMN No. PER-05/MBU/27 april 2007 tentang program kemitraan BUMN dengan usaha kecil dan program bina lingkungan dengan kondisi di lapangan. Dalam Peraturan Menteri BUMN No. PER-05/MBU/27 april 2007 pasal 9 menjelaskan bahwa sumber dana PKBL berasal dari

penyisihan laba bersih perusahaan sebesar 2% yang dapat digunakan untuk Program Kemitraan ataupun Bina Lingkungan sedangkan dalam kenyataannya di lapangan, PDAM Surya Sembada Kota Surabaya tidak menyiapkan dana khusus untuk melaksanakan program CSR bina lingkungan, melainkan dana yang dipakai yaitu anggaran kebutuhan bagian Humas.

c. Sumber daya waktu

Fakta dilapangan ditemukan bahwa masih terdapat beberapa permasalahan dalam menyesuaikan waktu antara para pelaksana program CSR bina lingkungan. Permasalahan yang terjadi di lapangan ialah mengenai manajemen waktu antara petugas pelaksana dari PDAM Surya Sembada Kota Surabaya dengan petugas pelaksana yang berasal dari luar perusahaan. Namun dibalik itu semua, petugas pelaksana PDAM Surya Sembada Kota Surabaya masih dapat mengatasi masalah tersebut dan menjalankan kegiatan-kegiatan program CSR bina lingkungan dengan baik dan berjalan lancar. Dari situ dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan program CSR bina lingkungan, para petugas pelaksana masih dapat melaksanakan manajemen waktu dengan baik.

3. Komunikasi antar organisasi

a. Koordinasi

Koordinasi dalam pelaksanaan CSR bina lingkungan adalah sebuah bentuk kerja sama dengan instansi-instansi yang terlibat. Keterlibatan instansi-instansi tersebut yang ada akhirnya akan melancarkan dalam pelaksanaan program CSR bina lingkungan PDAM Surya Sembada Kota Surabaya. instansi-instansi tersebut selain PDAM Surya Sembada Kota Surabaya adalah Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan (BBTKL) dan Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kota Surabaya yang mempunyai masing-masing tugas yang sangat penting dalam praktik pelaksanaannya.

Bentuk koordinasi yang dilakukan oleh PDAM Surya Sembada Kota Surabaya dilakukan secara bertahap. Mulai dari proses persiapan pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan, pembentukan petugas pelaksana, sampai tahap implementasi program CSR bina lingkungan. Dalam proses ini berbagai informasi penting dan instruksi pelaksanaan disampaikan kepada petugas sebagai pedoman

dalam melaksanakan kegiatan. Mulai dari delegasi wewenang yaitu memberikan wewenang secara khusus terhadap tugas yang nantinya akan dikerjakan ketika pelaksanaan kegiatan, pembagian tugas yaitu dengan pelimpahan tugas-tugas kepada para petugas ketika melaksanakan kegiatan CSR bina lingkungan, dan juga terkait ketepatan waktu para petugas agar menjalankan tugasnya dengan tepat waktu. Selain itu, bentuk koordinasi yang dilakukan oleh PDAM Surya Sembada Kota Surabaya ialah *controlling* dan pelaporan

b. Komunikasi

Sehubungan dengan komunikasi dalam pelaksanaan program CSR bina lingkungan, instansi-instansi yang terkait sudah diberikan sosialisasi terkait kegiatan yang akan dilakukan, komunikasi tersebut dilaksanakan oleh bagian Humas PDAM Surya Sembada Kota Surabaya kepada instansi-instansi terkait, proses komunikasi ini dikhususkan kepada para petugas dari masing-masing instansi yang terlibat untuk terjun di lapangan ketika pelaksanaan kegiatan program CSR bina lingkungan PDAM Surya Sembada Kota Surabaya. Komunikasi ini bertujuan agar para petugas mempunyai pengetahuan, tugas, fungsi dan wewenang yang tepat mengenai program CSR bina lingkungan yang akan dilaksanakan.

Dalam hal ini peneliti menilai bahwa dalam pelaksanaan program CSR bina lingkungan PDAM Surya Sembada Kota Surabaya, implementor sudah mengkomunikasikan pelaksanaan program CSR bina lingkungan dengan baik, terbukti dengan adanya komunikasi langsung maupun tak langsung dari PDAM Surya Sembada Kota Surabaya ke instansi terkait mengenai pelaksanaan program CSR bina lingkungan.

4. Karakteristik agen pelaksana

Sehubungan dengan ini, pelaksanaan program CSR bina lingkungan melibatkan beberapa agen pelaksana, diantaranya yaitu PDAM Surya Sembada Kota Surabaya, Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan (BBTKL), dan Dinas Kesehatan dan Pertamanan (DKP) Kota Surabaya.

PDAM Surya Sembada Kota Surabaya merupakan perusahaan yang bertanggung jawab sepenuhnya dalam pelaksanaan program CSR bina lingkungan disini. Dalam hal ini PDAM yang menentukan kegiatan-kegiatan CSR seperti apa yang akan dilaksanakan dan juga menentukan siapa-

siapa saja yang akan terlibat dalam kegiatan-kegiatan tersebut. Selain itu, PDAM Surya Sembada Kota Surabaya juga bertugas untuk memberikan wewenang-wewenang yang jelas kepada instansi-instansi yang terkait dengan implementasi program CSR bina lingkungan tersebut. Permasalahan yang ada dalam hal ini ialah tidak adanya bagian khusus yang menangani program CSR di PDAM Surya Sembada Kota Surabaya. Selama ini yang lebih aktif mengurus program CSR bina lingkungan PDAM Surya Sembada Kota Surabaya ialah bagian Humas.

Selain itu, Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan (BBTKL) Surabaya ikut serta dalam pelaksanaan program CSR bina lingkungan khususnya dalam kegiatan pengadaan Kran Air Siap Minum (KASM). Ruang lingkup kerjasama meliputi pengambilan contoh uji air dari sumber air, produksi, dan pelanggan PDAM Surya Sembada, pengujian kualitas air minum, serta analisis faktor risiko kesehatan lingkungan. Program pengujian kualitas air PDAM bersinergi dengan program BBTKL Surabaya yaitu uji petik kualitas air minum dan Pemantauan Kualitas Lingkungan Kawasan DAS Brantas. Upaya ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas air minum dan pelayanan pelanggan juga dapat mengurangi kejadian water borne disease atau penyakit tular air dari hulu (sumber air) sampai hilir (pelanggan).

Pelaksana lain dalam praktik pelaksanaan program CSR bina lingkungan PDAM Surya Sembada Kota Surabaya adalah Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kota Surabaya yang juga membantu dalam melaksanakan program CSR bina lingkungan khususnya dalam kegiatan pemberian gerobak sampah ke seluruh kelurahan yang ada di Surabaya yang akan dilaksanakan. DKP mempunyai wewenang untuk turut serta menjadi pelaksana dalam kegiatan pemberian gerobak sampah tersebut. Adapun tugas DKP yang lain sehubungan dengan kegiatan pembagian gerobak sampah tersebut yaitu untuk turut serta mendata seluruh kelurahan yang ada di Surabaya yang akan jadi sasaran berikutnya dalam kegiatan CSR tersebut. Oleh karena itu kerjasama antara PDAM Surya Sembada Kota Surabaya dengan DKP ini sangat diperlukan guna melancarkan kegiatan pemberian gerobak sampah yang juga masuk dalam salah satu bagian dari program CSR bina lingkungan PDAM Surya Sembada Kota Surabaya.

#### 5. Kondisi (sosial, politik, ekonomi)

##### a. Kondisi sosial

Kondisi sosial yang mempengaruhi program CSR bina lingkungan PDAM Surya Sembada Kota Surabaya yaitu kondisi masyarakat itu sendiri. Hal ini sehubungan dengan kegiatan pembangunan KASM. Dalam hal ini perilaku masyarakat sangat penting dalam menjaga fasilitas KASM yang ada. Dukungan masyarakat juga berpengaruh kegiatan-kegiatan lain seperti susur sungai dan juga pemberian gerobak sampah. Sikap baik dari masyarakat dapat membuat kegiatan-kegiatan tersebut berjalan dengan baik pula. Selain masyarakat, struktur tempat juga sangat berpengaruh dalam pelaksanaan program CSR bina lingkungan ini. Seperti yang dilakukan dalam pemilihan tempat pelaksanaan kegiatan susur sungai dan juga pembangunan KASM.

##### b. Kondisi ekonomi

Faktor eksternal yang juga mempengaruhi program CSR bina lingkungan PDAM Surya Sembada Kota Surabaya yaitu kondisi ekonomi. Dalam penelitian ini yang menjadi faktor pendorong keberhasilan implementasi program CSR yaitu bantuan dana yang didapat dari instansi lain. Minimnya dana yang disiapkan oleh pihak PDAM membuat mereka secara otomatis membutuhkan tambahan dana dari pihak luar khususnya instansi terkait. misalnya saja yang terjadi pada Tahun 2012, PDAM Surya Sembada Kota Surabaya pernah mendapat bantuan dana dari Bank BRI guna melaksanakan program CSR.

##### c. Kondisi politik

Dalam penelitian ini, kondisi politik yang sangat mempengaruhi dalam pelaksanaan program CSR bina lingkungan PDAM Surya Sembada Kota Surabaya ialah dukungan dari Pemerintah khususnya Pemkot Surabaya. Pemkot Surabaya sangat mendukung kegiatan-kegiatan CSR yang dilakukan oleh PDAM Surya Sembada Kota Surabaya. Hal ini dapat dibuktikan dengan keterlibatan langsung Walikota Surabaya pada kegiatan pembangunan fasilitas KASM.

#### 6. Disposisi implementor

Sehubungan dengan penelitian ini, pelaksanaan program CSR bina lingkungan PDAM Surya Sembada Kota Surabaya mendapatkan respon yang positif dari para pelaksana selain juga dari PDAM Surya Sembada Kota Surabaya yaitu Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan (BBTKL) Surabaya dan juga Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kota Surabaya. Para pelaksana

tersebut sudah paham dengan tugas dan fungsinya masing-masing, dan para petugas pelaksana program CSR bina lingkungan tersebut juga sudah ditempatkan sesuai dengan kemampuannya masing-masing.

## **PENUTUP**

### **Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan pada hasil serta pembahasan terhadap implementasi program *corporate social responsibility* studi pada bina lingkungan di Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Surya Sembada Kota Surabaya, yang dianalisis melalui teori yang diungkapkan oleh Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn mengenai indikator yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan dapat disimpulkan dengan melihat disetiap indikator-indikatornya.

Standar pada pelaksanaan program CSR bina lingkungan sudah jelas namun dalam praktiknya masih belum memenuhi standar terkait anggaran dalam pelaksanaannya. Sasaran dari kebijakan ini sudah tepat yaitu kepada seluruh elemen masyarakat dari anak kecil sampai dengan orang tua dan juga sektor pendidikan. Untuk tujuan program CSR yaitu untuk menjalankan tanggung jawab perusahaan sudah tercapai namun masih terdapat beberapa harapan pelaksana yang belum bisa tercapai.

Sumber daya manusia dalam pelaksanaan program CSR sudah didukung dengan petugas kompeten dan terampil. Para petugas juga diberikan perlengkapan fasilitas dalam pelaksanaannya misalnya kapal, peralatan ledeng, dan juga perlengkapan lainnya yang dibutuhkan. Petugas juga sudah ditugaskan dan difungsikan di masing-masing bidangnya, misalnya saja petugas dari DKP yang ditetapkan sebagai pelaksana dalam kegiatan pembagian gerobak sampah dan BBTKL dalam kegiatan KASM.

Sumber daya finansial dalam pelaksanaan program CSR masih ditemukan beberapa masalah yaitu tidak adanya anggaran khusus yang memang disiapkan guna implementasi program CSR tersebut. Anggaran untuk pelaksanaan CSR diambil dari anggaran yang dimiliki oleh bagian Humas yang besarnya 1 milyar per tahun. Sumber daya waktu dalam pelaksanaan program CSR bina lingkungan masih ditemukan beberapa kendala terkait manajemen waktu, namun para petugas pelaksana masih dapat mengatasinya dan melaksanakan program CSR dengan baik.

Koordinasi dari instansi-instansi yang terlibat sudah terjalin dengan baik, terbukti dengan adanya kerja sama antar petugas pelaksana di lapangan. Pelaksanaan program CSR sudah dikomunikasikan dengan baik oleh

implementor kepada para petugas yang terlibat dalam praktik pelaksanaannya dengan mengadakan komunikasi ke semua pihak terkait dan juga para petugas pelaksana. Para pelaksana terkait yaitu PDAM Surya Sembada Kota Surabaya, Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan (BBTKL), dan Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP).

Instansi yang terlibat dalam pelaksanaan program CSR bina lingkungan PDAM Surya Sembada Kota Surabaya adalah Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan (BBTKL) dan Dinas Kesehatan dan Pertamanan (DKP) Kota Surabaya yang mempunyai karakteristik masing-masing. Para agen pelaksana tersebut sudah mempunyai wewenang, tugas, dan fungsinya masing-masing.

Kondisi sosial yang terjadi pada pelaksanaan program CSR adalah perilaku dari masyarakat itu sendiri. Selain itu kondisi tempat juga menentukan keberhasilan program CSR yang akan dilaksanakan. Untuk kondisi politik yang mempengaruhi pelaksanaan program CSR bina lingkungan PDAM Surya Sembada Kota Surabaya ialah dukungan dari Pemerintah Kota Surabaya. Hal ini dapat dilihat dari keterlibatan langsung Walikota Surabaya dalam kegiatan KASM. Kondisi ekonomi yang ada pada pelaksanaan program CSR bina lingkungan adalah dibutuhkannya anggaran tambahan yang biasanya berasal dari instansi lain yang menjadi partner PDAM dalam menjalankan program CSR, misalnya saja DKP.

Respon dari petugas pelaksana sangat positif, para petugas pelaksana sudah paham dengan tugas dan fungsinya, dan para petugas juga sudah ditempatkan sesuai dengan kemampuannya masing-masing.

### **Saran**

Dari hasil pemaparan mengenai implementasi program *corporate social responsibility* studi pada bina lingkungan di Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Surya Sembada Kota Surabaya, maka saran yang dapat disampaikan oleh peneliti guna perbaikan pelaksanaan program CSR tersebut adalah sebagai berikut:

1. PDAM Surya Sembada Kota Surabaya sebaiknya mengadakan satu staff yang memang dikhususkan untuk mengurus program kemitraan dan bina lingkungan (PKBL) agar dapat lebih memudahkan pelaksanaan program CSR dan juga tidak mengganggu pekerjaan-pekerjaan yang lain.
2. PDAM Surya Sembada Kota Surabaya juga perlu menyiapkan anggaran khusus guna pelaksanaan program CSR bina lingkungan, seperti yang sudah dijelaskan pada Dalam Peraturan Menteri BUMN No. PER-05/MBU/27 april 2007 pasal 9 juga menjelaskan bahwa sumber dana PKBL berasal dari penyisihan laba bersih perusahaan sebesar 2% yang dapat

digunakan untuk Program Kemitraan ataupun Bina Lingkungan.

Mardalis. 2009. *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta: Bumi Aksara.

Sarwoto, Jonathan. 2006. *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007

Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012

<http://mediacsr.net/index.php/kesehatan/item/89-pdam-surabaya-meluncurkan-4-titik-kran-air-siap-minum-di-fasilitas-%E2%80%93-fasilitas-umum-kota.html>

<http://www.samahok.com>

## DAFTAR PUSTAKA

Suharto, Edi. 2010. *CSR & COMDEV*. Bandung: Alfabeta.

Agustino, Leo. 2008. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta, cv

Patilima, Hammid. 2004. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Alfabeta.

Subarsono, AG. 2010. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori, Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta

Tachjan. 2006. *implementasi kebijakan publik*. Bandung: AIPI

Wahab, Solichin Abdul. 2005. *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Bumi Aksara: Jakarta

Winarno, Budi. 2002. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Pressindo. P

Bungin, Burhan. 2007. *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial lainnya*. Jakarta: Kencana

Sugiyono. 2014. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung : Alfabeta

Hasan, M, Iqbal. 2002. *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.

Dwidjowijoto, R.N. 2006. *Kebijakan Publik Untuk Negara-negara Berkembang*. PT Elex Media Komputindo. Jakarta. 197 halaman

Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.